

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, N. B, 2012, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Cetakan ke 4, Jakarta.
- 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Effendy, M, 2010, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana) Referensi* (GP. Press Group), Jakarta
- Faal, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Farid, A. Zainal Abidin, 1995 , *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, A, 2004, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, cetakan ke tiga, Jakarta.
- Harahap, M.Y, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* edisi ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, O.S E, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamda, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein, M. H, 1991, *Orientasi Hukum acara Pidana Indonesia* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Husein, M.H, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Kaligis, O. C, 2007,., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid Cet.Pertama*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1983, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung.

- LiLi, R.IB, Wiyasa Putra Putra,1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Miriam, B, 1994, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhamad Rusli, 2011,*Sistem Peradilan pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 2006, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- . 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugraha Agung,2004, *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Hutan*, Wana Aksara, Banten
- Poernomo Bambang, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- . 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Amarta Bukum, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh,2010, *Hukum Pidana* , Rajawali Pers, Jakarta.
- Ramelan, 2005, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Remelink Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia, Jakarta.
- Salim,S. H, 2006. *Dasar –dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simon H, 1980, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Supriadi , 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika, Aditma, Bandung.

TIM FH-UI, 2001, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, FH UI, Depok.

Wisnubroto Al dan Widiartama.G, 2005, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Waluyo Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfa Achjani Eva, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesi, Bogor.

B. Peraturan Perndang-undangan

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar

Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015.

C. Karya Ilmiah dan Internet

Hamzah Andi, *Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam RCUHAP*, Teropong Volume 1-Agustus 2014.

Rudi Satrio, *Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia* (Suatu tanggapan terhadap RUU Kejaksaan” Jurnal Pembangunan, No.1, Februari 1991.

Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Tepadu*, Wacana Hukum, Vol VIII.No 1 April 2009.

Suryani, *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Pranata Hukum, Vol 4, No.1, Januari 2009.

Internet

Dita Pertiwi, “Hutanku Semakin Merana”,
<http://www.majalahreviewweekly.com/read/1528/hutanku-semakin-merana>, diakses 10/10/16 pukul 12:48.

Hukum Online, “RUU KUHAP Rapatkan Koordinasi Penyidik dan Penuntut”
Umum, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16466/ruu-kuhap-rapatkan-koordinasi-penyidik-dan-penuntut-umum>, diakses 26/04/17 pukul 8:43.

-----“Fungsi Surat Perintah Penyidikan”,
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c1a0bd9b5e8/fungsi-surat-perintah-penyidikan-\(sprindik\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c1a0bd9b5e8/fungsi-surat-perintah-penyidikan-(sprindik)),diakses 14/1/17 pukul 19:23.

-----. “MK Tetapkan 7 hari Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum>, diakses 09/3/17 Pukul 20:07.

PPID,” [Pemerintahan Presiden Djoko Widodo Bertekad Tidak ada Lagi Bencana Asap](http://redd-indonesia.org/index.php/pers/1460-pemerintahan-presiden-djoko-widodo-bertekad-tidak-ada-lagi-bencana-asap)”,
http://redd-indonesia.org/index.php/pers/1460-pemerintahan-presiden-djoko-widodo-bertekad-tidak-ada-lagi-bencana-asap?utm_campaign=REDDI+Newsupdate+Indonesia&utm_source=March+2015&utm_medium=email,diakses 18/04/2017 pukul 10:04.

Refky Saputra, “Eksistensi Hukum Pidana Diluar KUHP Dalam Revisi KUHP”,
<http://reformasikuhp.org/eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp/>, diakses 08/02/17 Pukul 10:59.